

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi ialah bagian untuk mengukur kemajuan suatu negara. Target dari pembangunan ekonomi selain untuk meningkatkan penghasilan riil juga dapat untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi bertujuan guna menaikkan taraf hidup pada Negara berkembang. Pada Negara berkembang seperti di Indonesia sering kali dijumpai masalah saat pelaksanaan mencapai target pembangunan ekonomi, salah satunya yaitu masalah kemiskinan dan keterbelakangan.

Di negara Indonesia masih saja dilanda oleh lingkaran setan dan sulit untuk di atasi karena penghasilan perkapita yang kecil. Penghasilan yang kecil menyebabkan simpanan yang kecil oleh dari itupun dana awal juga akan kecil. Karena dana awal yang kecil menyebabkan penanaman modal akan kecil dan produktivitas juga akan rendah. Bila produktivitas rendah maka pendapatan juga akan rendah, dan begitu seterusnya. Beginilah keadaan yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Salah satu cara dalam mengatasi lingkaran setan kemiskinan tersebut dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Kemiskinan dikarenakan bermacam aspek, beberapanya ialah tingkat gaji yang dibawah standar, pertumbuhan yang lambat, serta pengangguran yang tinggi. Seorang individu disebut miskin jika tidak dapat memenuhi kebutuhannya atau belum berpendapatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan ialah kondisi yang mana seseorang atau sekumpulan orang yang tidak dapat mencukupi keperluan utamanya, seperti pangan, sandang, hunian, kesehatan, serta pendidikan yang dipandang menjadi keperluan paling rendah dan mempunyai standar tertentu. Tidak sanggupnya seseorang dari segi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan pokok pangan dan bukan pangan yang dilihat dari segi konsumsi dan pengeluaran disebut dengan kemiskinan.

Sumatera Barat sendiri merupakan provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan yang cukup rentan di Indonesia. Hal ini di tunjukkan dengan ketimpangan pendapatan yang makin besar. Permasalahan kemiskinan ini salah

satu sebabnya karena banyaknya pekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga upah yang diterima juga kecil.

Tabel 1. 1

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019

Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal				
	2015	2016	2017	2018	2019
	Sept.	Sept.	Sept.	Sept.	Sept.
Jumlah Penduduk Miskin Daerah Perkotaan	118.480	119.510	114.590	125.580	120.580
Jumlah Penduduk Miskin Daerah Pedesaan	231.050	257.000	245.410	227.660	222.510
Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Barat (Jiwa)	349.530	376.510	359.990	353.240	343.090
Persentase Penduduk Miskin Daerah Perkotaan	5,73	5,52	5,11	4,99	4,71
Persentase Penduduk Miskin Daerah Pedesaan	7,35	8,27	7,94	7,9	7,69
Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat (Persen)	6,71	7,14	6,75	6,55	6,29

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Secara keseluruhan tingkat kemiskinan pada Provinsi Sumatera Barat menunjukkan grafik cenderung turun sejak tahun 2015 sampai 2019. Namun di pedesaan pada tahun 2016 tingkat kemiskinan meningkat mencapai 8,27 persen dan di daerah perkotaan selalu menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di daerah pedesaan menurun menjadi 7,94 persen. Berkurangnya tingkat kemiskinan di pedesaan Sumatera Barat tahun 2017 disebabkan oleh peningkatan penghasilan penduduk pada daerah pedesaan yang artinya meningkatnya pembangunan pada bidang peternakan, pertanian, serta bidang lainnya yang selama ini jadi program kerja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu dikarenakan perpindahan masyarakat desa menuju kota atau merantau yang mengakibatkan berpindahnya penduduk miskin pada perdesaan ke daerah kota. Tahun 2016 tingkat kemiskinan secara keseluruhan meningkat

namun yang cukup menarik yakni tingkat kemiskinan di pedesaan meningkat mencapai 8,27 persen namun tingkat kemiskinan di perkotaan menurun sebesar 5,52 persen. Umumnya masyarakat miskin di daerah pedesaan berprofesi sebagai buruh tani. Peningkatan jumlah penduduk yang masuk kedalam kategori miskin berdasarkan perhitungan BPS dipengaruhi oleh laju inflasi dan pertanian. Perhitungan kemiskinan mengacu kepada garis kemiskinan. Pada tahun 2016 komoditas non makanan berperan kecil terhadap garis kemiskinan dibandingkan makanan yang berperan lebih besar terhadap garis kemiskinan.

Seseorang dapat dikatakan miskin apabila pendapatan perkapita berada di bawah garis kemiskinan. Semakin rendah pendapatan perkapitanya maka semakin rendah pula kesejahteraan. Demikian pula dengan semakin rendah tingkat kesejahteraannya maka dapat dikatakan sebagai penduduk miskin atau orang miskin. Pengeluaran konsumsi adalah salah satu alat yang dipakai untuk menentukan garis kemiskinan. Batas kemiskinan ialah penjumlahan dari batas kemiskinan pangan dan batas kemiskinan bukan pangan berdasarkan pengertian dari BPS.

Tabel 1. 2

Garis Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019

Daerah Tempat Tinggal	Garis Kemiskinan Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal (rupiah/kapita/bulan)				
	2015	2016	2017	2018	2019
	September	September	September	September	September
Perkotaan	423.339	454.674	475.365	507.557	551.366
Pedesaan	391.178	425.520	441.415	466.430	510.457
Perkotaan dan Pedesaan	403.947	438.075	455.797	485.633	529.700

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Dapat dilihat pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya garis kemiskinan cenderung meningkat. Garis kemiskinan di Sumatera Barat per

September tahun 2019 garis kemiskinan mencapai Rp 551.366 di perkotaan dan Rp 510.457 pada pedesaan. Garis kemiskinan di daerah kota cenderung lebih tinggi di bandingkan di pedesaan karena biaya hidup di daerah kota cenderung mahal dibanding penduduk di daerah desa. Hal ini kemungkinan terjadi adanya perbedaan lapangan pekerjaan dan juga lokasi tempat tinggal yang berhubungan dengan permintaan atas tenaga kerja, kesempatan kerja, tingkat upah dengan demikian akan membedakan tingkat pendapatan dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah desa dan kota.

Masalah pengangguran sering dikaitkan dengan fenomena kemiskinan. Bertambahnya jumlah penduduk miskin dianggap karena banyaknya orang yang menganggur. Sementara itu di negara berkembang termasuk juga Indonesia, orang yang miskin akan berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga dengan cara bekerja apa saja. Status seseorang sebagai pekerja belum tentu bisa menjamin kalau seseorang akan sejahtera dan seseorang yang miskin belum tentu juga sebagai pengangguran (Priyono, 2002). Fenomena orang yang telah memiliki pekerjaan tetapi tetap saja tergolong miskin dikatakan juga sebagai pekerja miskin. Menurut International Labour Organization (ILO), pekerja miskin adalah anggota rumah tangga yang bekerja namun pendapatan/pengeluaran per kapitanya di bawah batas kemiskinan (ILO, 2006).

Adanya pekerja miskin dapat diindikasikan dengan kondisi dimana pengangguran turun atau sedikit dan banyak orang yang bekerja sedangkan kemiskinan semakin tinggi (Majid, 2001). Berdasarkan publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, pekerja di Sumatera Barat berjumlah sebanyak 2.460.554 orang, dengan persentase 94,67% dari total angkatan kerja sebanyak 2.599.013 orang. Jumlah pekerja pria lebih tinggi daripada wanita dengan jumlah pekerja sebanyak 1.471.188 orang pekerja laki-laki dan 989.366 orang pekerja perempuan dari total angkatan kerja. Ada sebanyak 5,33% total pengangguran dari total angkatan kerja di Sumatera Barat tahun 2019. Hal itu menandakan bahwasanya masalah pekerja miskin juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan publikasi diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin juga mempengaruhi pekerjaan dan tingkat kesempatan kerja yang diperoleh. Dalam hal ini laki-laki memiliki kesempatan berkerja lebih besar daripada perempuan.

Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti perempuan memiliki fisik lebih lemah daripada laki-laki yang menyebabkan jam kerja berlebih yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu pekerja laki-laki lebih banyak terlibat dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat perempuan kurang dalam mendapatkan kesempatan kerja yang menyebabkan lebih sedikitnya pendapatan yang diterima oleh perempuan.

Banyaknya pekerja yang mendapatkan penghasilan kecil adalah sesuatu yang mengkhawatirkan sebab penghasilan kecil bisa memperbesar risiko seorang pekerja rentan jadi miskin. Pada umumnya di beberapa negara, pekerjaan berpenghasilan kecil biasanya dipandang menjadi batu loncatan agar bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih besar, tetapi pada umumnya pekerja Indonesia bekerja dengan penghasilan yang kecil adalah sesuatu yang biasa terjadi dan tidak menjadikan batu loncatan. Ini berarti bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi serta pola penetapan pendapatan formal bisa saja tidak terjadi ke pekerja miskin, yang pada umumnya bekerja di sektor perekonomian informal yang mana aturan tenaga kerja susah dipraktikkan.

Pekerja yang memperoleh upah rendah berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan menjadi ambang batas kemiskinan disebut sebagai pekerja miskin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pekerja tersebut mendapatkan pendapatan di bawah garis kemiskinan antara lain: tingkat pendidikan, lapangan usaha, dan jenis kelamin.

Berdasarkan publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat 2019, pekerja berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan pada level pendidikan SMA sederajat yaitu sebanyak 764.800 orang. Kemudian tidak memiliki ijazah SD sebanyak 437.708 orang. Pekerja dengan ijazah SD sebanyak 437.696 orang, sedangkan pekerja dengan ijazah SMP sebanyak 431.188 orang. Dan pekerja dengan ijazah tertinggi yang ditamatkan dengan tingkat perguruan tinggi sebanyak 389.162 orang.

Berdasarkan publikasi BPS tersebut bisa diperhatikan bahwasanya pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan SMA sederajat mendominasi pekerja di Sumatera Barat, kemudian diikuti oleh pekerja yang tidak memiliki ijazah SD dan pekerja dengan pendidikan tertinggi SD. Salah satu faktor yang menyebabkan

pekerja menerima pendapatan dibawah garis kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi pendapatan karena semakin tinggi tingkat Pendidikan yang diselesaikan oleh pekerja tersebut maka akan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan upah yang lebih tinggi.

Pendidikan adalah variabel yang sangat menentukan dalam permasalahan kemiskinan pekerja. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula wawasan atau skill dalam bekerja dan juga akan meningkatkan peluang dalam pasar tenaga kerja. Dengan tingginya kesempatan kerja maka akan meningkat pula pendapatan. Tingkat pendidikan yang rendah lebih berpeluang menjadi miskin atau berpenghasilan rendah dibanding tenaga kerja yang tingkat pendidikannya tinggi.

Selanjutnya berdasarkan lapangan usaha yang ditekuni oleh pekerja sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima. Pekerja yang bekerja disektor formal bisa menerima gaji yang lebih besar dibanding pekerja yang bekerja disektor informal. Begitu juga dibidang pertanian yang menghasilkan upah yang lebih rendah dibanding dengan pekerja yang bekerja disektor formal dibidang non pertanian dengan upah yang lebih tinggi.

Menurut Hermanto, dkk (2016) status pekerja miskin sebagian besar bekerja pada lapangan usaha bergerak di bidang pertanian. Mayoritas pekerja berpendapatan rendah berada pada kelompok umur prima yaitu antara umur 25 sampai 54 tahun. Menurut Gangopadhyay (2013) kemiskinan pekerja diakibatkan oleh status sosial yang rendah. Pekerja miskin biasanya diderita oleh kaum perempuan dan tenaga kerja yang berumur lansia.

Pada kenyataannya penyerapan tenaga kerja terbesar adalah pada sektor pertanian atau sektor non formal. Penghasilan yang lebih besar biasanya didapatkan oleh individu yang bekerja pada sektor formal atau non pertanian.

Mutu kehidupan dapat dilihat melalui biaya untuk konsumsi yang bertujuan mempertahankan taraf hidup manusia sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan hidup bisa dilihat berdasarkan penghasilan perkapita. Pendapatan perkapita adalah rata-rata penghasilan untuk setiap orang. Seseorang akan memakai penghasilannya untuk berbagai komoditas dan jasa. Biasanya

kesejahteraan akan diraih jika seorang individu bisa mencukupi keperluan diri sendiri dan keluarga dari penghasilan yang didapat tersebut.

Dalam hukum Engel yang menyebutkan jika penghasilan naik maka persentase penghasilan buat biaya pangan akan menurun. Begitu pula dengan pendapatan pekerja miskin dimana saat pendapatan meningkat maka akan meningkat pula pengeluaran non makanan dan menurun pengeluaran konsumsi untuk makanannya.

Dari Fenomena yang terjadi menimbulkan pertanyaan bahwasanya ada sesuatu yang jadi aspek penentu terhadap penghasilan pekerja berada di ambang batas kemiskinan. Aspek tersebut muncul dari intern yaitu keadaan sosial ekonomi pekerja maupun faktor ekstern pekerja sehingga pendapatan atau kesejahteraan mereka masih di ambang batas kemiskinan. Kecenderungan menggunakan penghasilan yang besar terhadap kebutuhan non pangan dan sedikit untuk keperluan pangan terjadi pada pekerja dengan penghasilan besar. Sebaliknya pekerja dengan penghasilan yang kecil akan menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan utamanya.

Berlandaskan kenyataan bahwasanya seorang individu yang bekerja juga mengalami kemiskinan dan hasil dari penelitian sebelumnya juga mendukung fakta ini, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai “**Determinan Pendapatan Pekerja Miskin Di Provinsi Sumatera Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan uraian yang telah dijelaskan maka rumusan masalah penelitian ini adalah demikian:

1. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap pendapatan pekerja miskin di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan pekerja miskin di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh jenis lapangan usaha terhadap pendapatan pekerja miskin di Provinsi Sumatera Barat?
4. Sejauh mana pengaruh jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis lapangan usaha, secara bersama-sama terhadap pendapatan pekerja miskin di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Agar dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap pendapatan pekerja miskin di Sumatera Barat.
2. Agar dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan pekerja miskin di Sumatera Barat.
3. Agar dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh jenis lapangan usaha terhadap pendapatan pekerja miskin di Sumatera Barat.
4. Agar dapat mengetahui dan menganalisis pengaruh jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis lapangan usaha secara bersama-sama terhadap pendapatan pekerja miskin di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat daripada dibuatnya penelitian ini ialah:

1. Menjadi masukan untuk pemerintah serta pihak yang mempunyai tanggung jawab supaya bisa lebih memperhatikan masalah tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadi acuan yang mudah dipahami untuk peneliti pada bidang yang sama.

